

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Burgerlijk Wetboek Stb.1947-23(BW).

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297.

Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4849.

Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan jo Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2005.

Peraturan-pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 No.20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4609.

Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 151.

Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukturserta.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 83 tahun 2010 tentang Paduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transpotrasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
Bab. 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Metodologi Penelitian.....	15
a. Pendekatan Masalah.....	15
b. Sumber Bahan Hukum	17
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
d. Analisa Bahan Hukum.....	18
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	18
Bab. 2 PRIVATISASI PENGELOLAAN FASILITAS PELABUHAN	
2.1 Pengertian Privatisasi	20
2.2 Landasan Hukum Pelaksanaan Privatisasi.....	27

2.3 Tujuan dari Privatisasi	43
2.4 Alternatif Cara Privatisasi.....	51
2.4.1 Sewa	52
2.4.2 Penjualan Aset Pelabuhan	54
2.4.3 Join Venture	56
2.4.4 Initial Public Offering	60

Bab 3 KONTRAK KERJASAMA SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA

3.1 Karakteristik Kontrak Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan.....	63
3.2 Substansi Kontrak Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan	78
3.3 Bentuk Kontrak Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan	85
3.4 Bangun Guna Serah (<i>Built Operate Transfer</i>) Sebagai Alternatif Bentuk Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia.....	92
3.5 Akibat Hukum Bentuk Kerjasama BOT dalam Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia.....	101

Bab 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	109
4.2 Saran.....	110

DAFTAR BACA

LAMPIRAN

